

**EVALUASI PROSES PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR PASCA
LIMA TAHUN PEMEKARAN KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

By: Tio Rastra
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Education is one form of investment to human resources will be an asset in the development of the nation in the future. Therefore, people must receive affordable and quality education, through quality education and low through 9-year compulsory education program. An attempt by the government and society Regency Meranti to develop human resources which has the quality of academic competence high, intelligent, moral, faithful, devoted, responsive environments and has the ability (hard and soft skills) is high, so that they can live and compete in employment free.

This study aimed to evaluate the development process of educational facilities in the district of East Cliff High after five years of expansion Meranti Islands District. Policy theory and the theory of evaluation is a cornerstone in this study. This study uses qualitative research. Based on the analysis that has been done, the process of construction of educational facilities in the district of East High Cliff is still not in accordance with national education standards as referring to the existing regulations. But the government's efforts in meeting the standardization it is still running today. And the development of educational infrastructure is still running despite the lack of constrained budget allocation.

Keywords: Policy, Evaluation and Education Facilities and Infrastructure

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mengacu pada VISI dan Misi yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti maka Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut

- a. Menyelenggarakan Wajib belajar 12 Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memenuhi hak dasar sebagai warga negara.
- b. Berusaha menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas awal jenjang Sekolah Dasar/MI atau yang sederajat.
- c. Mengembangkan budaya baca untuk menghindari buta aksara kembali (*relapse illiteracy*), dan menciptakan masyarakat belajar.
- d. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan nonformal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak dari pelaksanaan Wajar 9 Tahun.
- e. Meningkatkan penyediaan tenaga kerjalulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan menguatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja.
- f. Meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyeraskan jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- g. Meningkatkan perluasan pendidikan usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal.
- h. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya.
- i. Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam memperoleh proses pembelajaran, karena adanya kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- j. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

- budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik.
- k. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan memantapkan pemahaman nilai pluralisme, toleransi dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat.
 - l. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup.
 - m. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar.
 - n. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan mengembangkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pembelajaran.
 - o. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dibidang pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, alat bantu pengajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen serta pendidikan dan infrastruktur pendidikan.
 - p. Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, serta evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan ditingkat Kecamatan.
 - q. Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat.
 - r. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk didalamnya pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
 - s. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk

penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan (akses) dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efesiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk mendukung upaya menuju wajib belajar 12 tahun.

Selama 5 tahun berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata, terutama di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Tebing Tinggi Timur adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibukota kecamatan adalah Sungai Tohor. Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Tebing Tinggi, dibentuk pada tanggal 26 Januari 2011. Adapun wilayahnya terletak di Pulau Tebing Tinggi bagian timur. Dari data statistik di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tahun 2011 – 2013 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan prasarana pendidikan dan berbanding terbalik dengan jumlah murid yang bertambah tiap tahunnya.

Misi ke 3 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah *“meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat”* yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena itu masyarakat

harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas dan murah melalui program wajib belajar 9 tahun. Merupakan upaya pemerintah dan masyarakat Kabupaten Meranti untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi akademis yang tinggi, cerdas, bermoral, beriman, bertaqwa, tanggap lingkungan dan memiliki kemampuan (*hard* dan *soft skill*) yang tinggi, sehingga mampu hidup dan bersaing di lapangan kerja bebas.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melihat proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur pasca lima tahun pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“EVALUASI PROSES PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR PASCA LIMA TAHUN PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang dan penjelasan permasalahan, maka perumusan permasalahan yang relevan dalam penelitian ini adalah Mengapa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur belum sesuai dengan tujuan

pendidikan Kabupaten
Kepulauan Meranti ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur pasca lima tahun pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui apa tujuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur pasca lima tahun pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Untuk mengetahui apa saja lembaga yang terlibat di dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan wawasan untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam fungsi politik baik itu peran politik maupun implementasi kebijakan sebagaimana dengan judul penelitian ini *“Evaluasi proses Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur pasca lima tahun pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti”*.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi bagi pembaca maupun peneliti, dan

juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan oleh aparatur pemeritahan dan instansi yang terkait di bidang pendidikan agar dapat terwujudnya pemerintah *“Good Governance”* di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan

Kebijakan publik menurut James E Anderson (dalam Islamy, 1994) adalah kebijakan – kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah: 1) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) Bahwa kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

2. Teori Evaluasi

Deskripsi utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan

tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pertanyaan yang terlontar tentang evaluasi bukanlah mengenai fakta (apa sesuatu ada?) atau aksi (apakah yang harus dilakukan). Tetapi berhubungan dengan nilai (berapa nilai?) karena evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dengan metode analisis kebijakan lainnya seperti yang dipaparkan Dunn (2000:167) yaitu :

1. Fokus nilai evaluasi berbeda dengan pemantauan dipusat pada penilaian yang menyakut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interpendensi fakta nilai tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau rendah diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok ataupun seluruh masyarakat. Untuk menyatkan yang demikian harus didukung harus bukti-bukti bahwa hasil

kebijakan secara aktual merupakan kosenkuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu kerana itu pemantaun merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masakini dan masalampu, tuntutan evaluasi berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif diarahkan pada hasil sekarang dan masalalu, dibandingkan dengan hasil dimasadepan. Evaluasi bersifat retrosprektif dan setelah (ex ant girang) .
4. Dualitas nilai. Nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena meraka dipandang sebagai tujuan dan sebagai sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Dapat dianggap sebagai intrisik dan ekstrinsif nilai-nilai sering ditata dalam suatu yang merefleksikan kepentingan dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Dinas Pendidikan Budaya dan Pariwisata. Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam

penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Dokumen

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dan pengolahan data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Proses Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan prasarana pendidikan PAUD di Kecamatan Tebing Tinggi belum menyeluruh dan merata dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PAUD bagi pertumbuhan kecerdasan anak. Oleh karena itu dalam upaya memasyarakatkan PAUD ini perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat di daerah perdesaan. Sehingga dengan demikian akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola

PAUD/TK/RA, meningkatkan jumlah anak yang mengikuti pendidikan PAUD dan meningkatkan mutu pelayanan PAUD.

2. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Kecamatan Tebing Timur ada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang prasarananya kurang memadai. Diantaranya adalah SDN 39 Desa Suir, keberadaan Sekolah Dasar Negeri 39 Dusun Batang Buah Desa Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur kini dalam kondisi memprihatinkan. Bukan hanya minim dengan sarana prasarana, letak sekolah yang berada di daerah terpencil ini juga jarang mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Pertama

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah pertama MTSn Desa Tanjung Sari masih minim dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana di SMP Negeri Desa Sungai Tohor, Tanjung Gadai dan Kepau Baru. Untuk itu penulis memilih untuk menekankan pada MTSn Desa Tanjung Sari ini.

4. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Atas

Dari jumlah SMA menurut kecamatan tahun 2013 diatas dapat dilihat jumlah SMA di kecamatan Tebing Tinggi Timur ini sebanyak dua SMA. Namun untuk menyikapi perkembangan zaman kedepan maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah atas haruslah lebih ditingkatkan lagi, misalnya penambahan pembangunan SMA yang baru. Karena jumlah siswa pasti akan meningkat setiap tahunnya dan buat memangkas jarak tempuh buat siswa yang rumahnya berjauhan dari sma yang sudah ada sekarang.

2. Tujuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

1. Tujuan Pembangunan Sarana Pendidikan Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan mutu di pendidikan dasar, wajib belajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendidikan. Meningkatnya strata pendidikan rata-rata penduduk akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan menerapkan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan produktifitas tenaga kerja. Pengelolaan pendidikan yang baik dan berkualitas membawa konsekuensi penyediaan anggaran

yang memadai baik dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah maupun kontribusi dari masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan.

2. Tujuan Pembangunan Prasarana Pendidikan Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membangun sektor pendidikan tentu sangat serius dan konsisten membangun sektor pendidikan. Dalam upaya memastikan bahwa kegiatan pembangunan sektor pendidikan itu berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi membantu pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti minimal memenuhi standar nasional bidang sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi baik sesama SKPD maupun dengan lembaga vertikal.

3. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DI DALAM PROSES PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR

1. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti

Bappeda adalah salah satu lembaga pemerintahan yang terkait di

dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang di dalamnya terdapat misi untuk meningkatkan pendidikan, termasuk sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri.

2. DISDIKBUD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan yang sangat penting keberadaannya di dalam proses pendidikan termasuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal – hal mengenai pendidikan semuanya atas naungan DISDIKBUD sebagai penyelenggara pendidikan.

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah yang terkait langsung di dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dinas Pekerjaan Umum mengerjakan proyek bangunan sekolah dan juga fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan dan berdasarkan keputusan dari DISDIKBUD. Dinas Pekerjaan Umum dan DISDIKBUD saling bekerjasama dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan;

1. Perencanaan proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum terealisasi dengan maksimal baik di tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA.
2. Bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sudah berjalan sejak Kecamatan Tebing Tinggi Timur dimekarkan menjadi Kecamatan sendiri. Proses pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur masih belum sesuai dengan standarisasi pendidikan nasional sebagaimana merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Akan tetapi upaya pemerintah dalam memenuhi standarisasi itu tetap berjalan sampai saat ini. Dan pembangunan prasarana pendidikan tetap berjalan meskipun terkendala minimnya alokasi anggaran. Peningkatan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, ruang majelis guru, laboratorium menjadi fokus utama disamping

peningkatan akses ke sekolah dan kenyamanan lingkungan sekolah.

3. Lembaga – lembaga yang terkait di dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sudah menjalani tugas nya, akan tetapi di dalam proses nya masih ada ditemukan hambatan yang terjadi. Masalah yang terjadi meliputi anggaran, transportasi, dan akses menuju ke Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya model kerjasama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan pihak swasta
2. Perlu upaya signifikan dari Pemerintah Daerah untuk menarik dana alokasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti umumnya dan Kecamatan Tebing Tinggi khususnya.
3. Perlu adanya inovasi disektor pendidikan seperti program Indonesia Mengajar dan model-model pembelajaran yang efektif termasuk dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta di luar kabupaten kepulauan meranti.
4. Perlu adanya dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidik

Miriam Budiarjo, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama,

Peter, B. Guy. 1984. *American Public Policy*. Franklin Watts, Tulano University: New York

Purwo Santoso dkk. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta. FISIPOL UGM

Ratnawati, T ,2009, *Pemekaran Daerah : Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Saile Said, 2009, *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta, Restu Agung.

Samodra, Wibawa., Yuyun Prabukusumo dan Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirojuzilam, 2008. *Ekonomi dan Perencanaan Regional*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa,.

Sudiyono. 1992. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program)* Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fisipol. UGM Yogyakarta.

Tangkilisan, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset: Yogyakarta.

Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ

William, N, Dunn. 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.

Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

PP 39 Tahun 2006 Secara Khusus Membahas Mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.